

## Pinggir Kali Cisadane Longsor, Akses Jalan Desa Tanjung Burung Lumpuh

**TANGERANG (IM)** - Curah hujan yang tinggi mengakibatkan pinggir Kali Cisadane di wilayah RT/RW 06/03, Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang mengalami longsor pada Sabtu (11/12) pagi. Insiden tersebut menyebabkan akses jalan mengalami gangguan.

"Kami dapat laporan dari warga Desa Tanjung Burung, jalan yang ada di pinggir Kali Cisadane menuju kampungnya longsor tadi subuh sekitar pukul 05.00 WIB," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Abdul Munir dalam keterangannya, Sabtu (11/12).

Munir mengatakan BPBD Kabupaten Tangerang telah melakukan penilaian bencana longsor tersebut sekitar pukul 09.30 WIB. Dia melaporkan jalan utama menuju Desa Tanjung Burung menjadi lumpuh akibat bencana itu sehingga dilakukan pengalihan akses jalan.

"Jalan utama menuju Desa Tanjung Burung tidak bisa dilewati dan untuk jalur pengalihan menuju Desa Tanjung Burung melalui jalur bawah atau jalur

sementara," jelasnya.

Longsor di area menuju Desa Tanjung Burung juga pernah terjadi pada tahun lalu dan sudah diperbaiki dengan pembangunan turap di pinggir Kali Cisadane.

Selain turap, ditempatkan pula batu-batu kali untuk menopang longsor.

Di samping itu, lalu lintas menuju Teluknaga dan Pakuhaji diberi akses jalan alternatif yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Tangerang pada awal 2021. Jalan alternatif tersebut dibuat di bawahnya atau di sampingnya yang bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat.

"Kami sudah koordinasi dengan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Tangerang dan juga Kecamatan Teluknaga terkait rekomendasi penanganan selanjutnya," kata Munir.

Adapun dalam insiden longsor itu, Munir mengatakan tidak ada masyarakat yang menjadi korban jiwa.

"Peristiwa longsor tersebut tidak ada korban jiwa, baik korban meninggal dunia dan korban luka-luka," ujarnya. ● pp

## Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 2.000 Meter

**YOGYAKARTA (IM)** - Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 2.000 meter ke arah barat daya pada Minggu (12/12).

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPT-KG), Hanik Humaida menyebutkan, awan panas guguran itu terjadi pada pukul 10.18 WIB. "Awan panas guguran tercatat di seismogram dengan amplitudo 27 mm dan durasi 158 detik," kata dia melalui keterangan resminya di Yogyakarta.

Hanik mengatakan, saat awan panas keluar dari Merapi, angin di gunung itu tercatat berembus ke arah timur. Pada periode pengamatan pukul 00.00 sampai 06.00 WIB, gunung api aktif itu juga tercatat mengeluarkan guguran lava pijar 3 kali dengan jarak luncur maksimum 1.000 meter ke arah barat daya.

Pada periode itu, BPPT-KG mencatat 43 kali gempa guguran dengan amplitudo

3-15 mm selama 24-145 detik, satu kali gempa fase banyak dengan amplitudo 2 mm selama 13 detik. Kemudian, tiga kali gempa fase banyak dengan amplitudo 2-6 mm selama 4-8 detik dan satu kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 35 mm selama 11 detik.

Berdasarkan pengamatan visual aktivitas Gunung Merapi periode 3-9 Desember 2021, BPPTKG mencatat volume kubah lava barat daya Merapi sebesar 1.629.000 meter kubik dan kubah di tengah kawah Merapi sebesar 3.007.000 meter kubik. Hingga saat ini, BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level III atau siaga.

Guguran lava dan awan panas Gunung Merapi diperkirakan bisa berdampak ke wilayah sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Kuning, Boyong, Bedog, Kraak, Bebeng, dan Putih. Saat terjadi letusan, lontaran material vulkanik dari Gunung Merapi diperkirakan dapat menjangkau daerah dalam radius 3 kilometer dari puncak gunung. ● pra



IDN/ANTARA

**SAMPAH DI KAWASAN PARIWISATA BALI** Seorang wisatawan melintas di dekat tumpukan sampah yang berserakan di sepanjang Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, Bali, Minggu (12/12). Sampah tersebut terbawa arus laut yang kemudian terdampar sehingga mencemari kawasan pariwisata.

## Libur Nataru, Kawasan Puncak akan Diperketat

**CIBINONG (IM)** - Kabupaten Bogor menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2. Namun jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal mengawasi lebih ketat wisatawan ke kawasan Puncak guna meminimalisasi penyebaran Covid-19.

"Pengawasannya nanti pasti ketat seperti PPKM Level 3, apalagi Nataru. Terutama di kawasan wisata seperti Puncak," kata Bupati Bogor, Ade Yasin, Minggu, (12/12).

Ade Yasin mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. Ditambah pusat memberikan kewenangan kebijakan PPKM kepada daerah setelah memutuskan tidak menerapkan PPKM Level 3 saat Nataru.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 varian Omicron. Sehingga pengawasan dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor. Terlebih, Bogor diprediksi bakal menjadi tujuan para wisatawan untuk merayakan Tahun Baru.

"Intinya, kita lakukan pengawasan sesuai arahan pusat demi meminimalisasi penyebaran Covid-19," tegas Ade Yasin.

Dalam aturan Inmendagri yang mulai berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 tersebut sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni Inmendagri 62/2021 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Covid-19 pada Saat Nataru.

Pada aturan baru ditambahkan pemda memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah.

Masyarakat diimbau sedapat mungkin tinggal di rumah, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan Pawai dan arak-arakan tahun baru serta acara Old and New Year dilarang, baik di tempat terbuka maupun tertutup. ● gio

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

## BANJIR DI KOTA BANDUNG

Pengendara mendorong motornya yang mogok akibat menerobos banjir di Jalan Soekarno-Hatta, Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/12). Banjir setinggi 30-60 sentimeter akibat hujan lebat di berbagai wilayah di Kota Bandung membuat saluran drainase tidak mampu menampung volume air yang tinggi.

# Satpol PP Kab. Bogor Siap-siap Tertibkan Lapak PKL di Cisarua

Saat ini Satpol PP sedang melakukan pendataan bangunan PKL di Kecamatan Cisarua. Mereka diminta pindah atau direlokasi ke Rest Area Puncak yang akan diresmikan pada Bulan Juni Tahun 2022 mendatang.

**CIBINONG (IM)** - Pemkab Bogor bakal menertibkan bangunan atau lapak milik PKL sebelum bangunan Rest Area Puncak di Gunung Mas diresmikan nanti.

Lapak milik PKL dari perbatasan Cianjur hingga pertigaan Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua Bogor yang akan ditertibkan hingga kini masih dilakukan pendataan oleh

Satpol PP Bogor. Baik itu yang berada di lahan milik PT. Perkebunan Nusantara VII, PT. Sumber Sari Bumi Pakuan, Pemprov Jawa Barat atau pihak lainnya.

"Saat ini Satpol PP sedang melakukan pendataan bangunan PKL di Kecamatan Cisarua. Mereka diminta pindah atau direlokasi ke Rest Area Puncak yang akan diresmikan

pada Bulan Juni Tahun 2022 mendatang, hingga sebelum itu harus bergeser. Sementara bangunannya bisa dibongkar mandiri atau kami yang akan menertibkan," kata Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho kepada wartawan, Minggu (12/12).

Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor ini menerangkan PKL yang direlokasi ke Rest Area Puncak merupakan PKL yang sudah didata pada Tahun 2016 lalu, saat Satpol PP atau Pemkab Bogor melakukan penertiban PKL di Jalan Raya Puncak.

"Kalau PKL baru itu tidak masuk kedalam kelompok yang direlokasi ke Rest Area Puncak hingga kami minta

mereka bersiap diri mencari tempat usaha baru yang tidak melanggar aturan. Jumlah PKL yang sudah didata pada Tahun 2016 lalu dan akan direlokasi, datanya ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor," terangnya.

Agus berharap para pemilik lahan segera mengamankan aset lahannya dan merencanakan pemanfaatan selanjutnya, usai pihaknya melakukan penertiban bangunan permanen dan non permanen milik PKL.

"Kami sudah berkomunikasi kepada pihak terkait, agar ada perencanaan pemanfaatan lahan usai bangunan para PKL ditertibkan, untuk lahan milik Pemprov Jawa Barat seperti

yang ada bangunan Restoran Rindu Alam itu kabarnya akan dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau hingga bisa menyerap air secara maksimal; harap Agus.

Ia melanjutkan selain dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau, ada rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR) akan melaksanakan pelebaran jalan dan pembangunan pedestrian.

"Guna mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan di Kawasan Puncak, KemenPU-PR akan melanjutkan lagi program pelebaran jalan dan pembangunan pedestrian. Saya harap, Tahun 2023 proyek tersebut bisa dilaksanakan lagi pembangunannya," lanjutnya. ● gio

## Kejar Target, Tim Vaksin Hunter Diluncurkan di Kabupaten Bogor

**CIBINONG (IM)** - Beberapa hari ini personel gabungan dari TNI, Polri, Sat Pol PP, dinas kesehatan di Kabupaten Bogor terus mencari, mendatangi warga dan melakukan vaksinasi covid-19.

Tim ini, jelas dia, akan berpatroli secara mobile untuk mencari warga yang belum divaksinasi covid-19. Lalu divaksin untuk mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal. "Launching Tim Vaksin Hunter ini dengan dibekali data warga yang belum divaksinasi covid-19. Tenaga kesehatan yang ada di kami akan langsung memvaksin warga tersebut,"

kata Kapolres Harun, Minggu (12/12).

Sasaran di awal Tim Vaksin Hunter bergerak menasar di Kecamatan Cibinong yaitu di 4 (empat) kelurahan yakni Kelurahan Ciriung, Kelurahan Babaran Mekar, Kelurahan Cibinong dan Kelurahan Tengah. Kemudian lanjutnya, untuk di 37 kecamatan lainnya setelah data warga yang belum divaksinasi covid-19 lengkap, baru akan disasar oleh Tim Vaksin Hunter.

Lebih jauh soal cara kerja tim tersebut, Kapolres mengatakan, bahwa tim juga akan mendata apa kendala masing-masing kecamatan. "Sudah tahu di mana kendalanya, kita

akan carikan solusinya, agar target 3,7 juta penduduk selesai divaksinasi covid-19 tahap 2 bisa tuntas pada akhir Bulan Desember ini," jelasnya.

"Diharapkan dengan upaya yang dilakukan ini, target sebesar 70 persen proses vaksinasi di akhir tahun 2021 yang di targetkan pemerintah ini bisa kita realisasikan di Wilayah Kabupaten Bogor," tambahnya.

Kapolres Bogor yang juga selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, selalu rutin dan terjun langsung melakukan pengawasan kerja dari tim tersebut.

Seperti yang dilakukan

kemarin atau tepatnya Sabtu (11/12). Kapolres Harun melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke Kampung Bunisari tepatnya ke RT 02/08, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong. Bersama Kabag Ops Polres Bogor Kompol Fitra Zuanda, Kapolsek Cibinong AKP Bayu Tri Nugraha Hidayat, Kasat Binmas Polres Bogor AKP Irrine, Panit Binmas Polsek Cibinong Iptu Dodi Mulyadi, Lurah Cibinong Sugiyanto, bersama Babinsa dan Dhabinkamtibmas dan tim Dokkes Polres Bogor, melihat dan memeriksa jalannya kegiatan vaksinasi. ● gio

## Erick Thohir: Korban Semeru akan Direlokasi di Lahan Perhutani

**JAKARTA (IM)** - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan wilayah relokasi untuk para pengungsi korban erupsi Gunung Semeru. Dalam kunjungannya ke Lumajang, Minggu, Erick yang menggunakan seragam Banser mengaku dirinya sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya.

"Saya sudah berbicara dengan Bu Siti (Siti Nurbaya) Menteri Lingkungan Hidup. Akan disiapkan lahan untuk

relokasi korban bencana ini," kata Erick Thohir di Lumajang, Minggu (12/12).

Erick menjelaskan, rencananya pemerintah akan menggunakan lahan milik Perhutani untuk menjadi wilayah relokasi. Hanya saja, ia belum memastikan wilayah mana yang akan dijadikan tempat relokasi.

Selain soal relokasi, Erick juga akan menjamin program pendidikan bagi anak-anak korban erupsi Semeru. Kata dia, seluruh BUMN akan mengalokasikan dana untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak

korban bencana.

Ia meminta agar data penerima beasiswa tersebut diambil dari data yang berasal dari Bupati Lumajang. "Nanti ini akan dikordinir oleh Yayasan BUMN. Pemerintah berharap semua anak-anak bisa mendapatkan akses pendidikan kembali, secepatnya," ujar Erick.

Erick meminta agar semua korban bencana bangkit dan terus maju. Mereka harus bisa menatap ke depan. "Pemerintah sudah hadir dalam situasi seperti ini, termasuk Presiden," kata dia. ● pra



IDN/ANTARA

## PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19 DI JAMBI

Seorang remaja putri mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dari petugas Puskesmas Paal Lima di gerai vaksinasi area publik Kota Jambi, Kota Baru, Jambi, Minggu (12/12). Cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Jambi saat ini telah mencapai 68,95 persen (dosis 1) serta 48,44 persen (dosis 2) dan pemerintah daerah setempat terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi hingga mencapai sedikitnya 70 persen pada akhir tahun ini dengan memperbanyak pembukaan gerai vaksinasi di area publik dan menjalankan program jemput bola.

## Amankan Aset, Pemkot Bogor Usulkan Bentuk Tim Pengamanan Aset Daerah

**BOGOR (IM)** - Pemkot Bogor bakal membentuk tim terpadu pengamanan aset daerah Kota Bogor.

Keinginan Pemkot Bogor membentuk tim terpadu pengamanan aset daerah diadiri DPRD Kota Bogor. Dengan adanya tim tersebut, diharapkan aset daerah yang dimiliki Kota Bogor bisa terdata.

"Tim ini bertugas menagih pengembang yang belum menyerahkan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) berdasarkan Perda Kota Bogor nomor 2 tahun 2018 dan Perwali Kota Bogor nomor 114 tahun 2020, " kata Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta kepada wartawan, Minggu (12/12).

Ia menjelaskan, tim terpadu nantinya akan melakukan pendataan, menagih aset dari pengembang yang bermasalah, serta menginventarisir aset yang belum diserahkan ke Pemkot Bogor.

Alma menganalisis sejumlah pengembang di Kota Bogor belum menyerahkan kewajiban kepada pemerintah daerah berupa fasos-fasum. Mereka tidak menyerahkan kewajiban dengan berbagai alasan.

"Hasil pengamatan saya masih banyak masalah fasos dan fasum di Kota Bogor yang belum diselesaikan administrasinya, ini dapat berdampak tidak baik terhadap penilaian pengamanan aset pemerintah," tegasnya.

Karena itu, Alma segera membuat nota dinas untuk membentuk tim terpadu pengamanan aset Pemkot Bogor. Tim terdiri dari unsur Forkopimda yaitu

Pemkot Bogor, Kejaksaan Negeri (Kejar) Kota Bogor, Kepolisian Resor Kota Bogor Kota dan BPN Kota Bogor.

"Tim tersebut nantinya melakukan pendataan, menagih aset dari pengembang yang bermasalah, serta menginventarisir aset yang belum diserahkan ke Pemkot Bogor," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya mengungkapkan, langkah pencegahan terjadinya tindakan dan perilaku korupsi harus ada langkah-langkah konkret di setiap daerah.

Khusus untuk Kota Bogor, ia mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yakni Perda tentang Pedoman Perlindungan Aset Daerah. Menurutnya, merupakan bukti keseriusan yang dimulai untuk pencegahan kerugian atas aset daerah.

"Bukan sebagai isapan jempol dan hanya basa basi, Raperda atas indentifikasi dan inventarisasi dan pengamanan aset daerah akan menjadi perda di tahun 2022," terang Atty yang juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan Kota Bogor. Atty menekankan, aset daerah sangat penting untuk diamankan untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan begitu, tidak ada lagi aset yang dikuasai dan dinikmati segelintir oknum yang menguasai aset daerah yang berada di wilayah hukum Kota Bogor.

"Saya setuju 100% dengan Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor untuk segera dibentuk guna menyelesaikan aset fasos dan fasum yang belum diserahkan kepada pemerintah," ujarnya. ● gio